



KOMUNISME KEMBALI MENGANCAM INDONESIA?

Debora Sanur L.*)

Abstrak

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal dengan G30S/PKI dianggap sebagai peristiwa pengkhianatan terbesar terhadap bangsa Indonesia. Belakangan timbul fobia dalam masyarakat Indonesia akan kembalinya paham komunis dan PKI di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat penegak hukum merazia atribut berlambang palu-arit yang identik dengan lambang PKI dan menyita buku-buku berbau komunis atau sejarah PKI di sejumlah daerah Indonesia. Namun demikian, apakah benar komunis kembali mengancam Indonesia, mengingat bahwa Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi Pancasila. Pancasila telah diletakkan sebagai dasar negara yang menjadi ideologi dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendahuluan

Hingga kini pemberontakan G30S/PKI masih dianggap sebagai peristiwa pengkhianatan terbesar terhadap bangsa Indonesia. Perbincangan mengenai bangkitnya komunisme diawali dengan adanya acara simposium nasional bertema “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” pada tanggal 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta Jakarta yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya muncul acara tandingan, yaitu Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri, Ormas Keagamaan dan Kepemudaan pada tanggal 13 Mei 2016 di Balai Kartini Jakarta. Setelah kedua acara tersebut, belakangan ini muncul kembali kekhawatiran akan bangkitnya PKI sehingga muncul protes masyarakat yang menyuatkan bahaya bangkitnya komunisme.

PKI dan komunisme yang kembali dibicarakan oleh masyarakat awam, seakan menimbulkan teror baru dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Komunisme dianggap kembali mengancam Indonesia dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum bersikap sigap untuk peka terhadap potensi kebangkitan PKI pada masa kini. Aparat pun segera melakukan tindakan razia terhadap atribut berlambang palu-arit mirip lambang PKI dan menyita buku-buku berbau komunis atau sejarah PKI di sejumlah daerah Indonesia. Demikian pula terhadap lagu yang dinilai merupakan simbol gerakan PKI, yaitu lagu Genjer-genjer. Melalui aksi razia di Mojokerto. Seorang musikus yang menyanyikan lagu itu ditangkap dan diperiksa oleh aparat kepolisian.

*) Peneliti Muda Ilmu Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: debora.sanur@dpr.go.id



Dasar dari tindakan aparat kepolisian kembali merazia dan menertibkan kemungkinan berkembangnya komunisme adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yaitu TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Selain TAP MPRS tersebut, larangan terhadap paham komunisme juga terdapat di dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Pemberontakan PKI dan Larangan Komunisme di Indonesia

Istilah Komunisme, berasal dari bahasa Latin “Comunis” yang artinya “milik bersama”. Istilah ini berasal dari pemikiran Karl Marx dan Engels yang dikenal dengan Marxisme. Konsep Marxisme mengatakan bahwa perjuangan kelas akan melahirkan revolusi yang akan membawa kemenangan kelas pekerja (proletar) atas kaum kapitalis (borjuis). Hal ini akan membuat kepemimpinan diktator hilang dengan sendirinya.

Dalam sejarah perjalanan di Indonesia, sebelum tahun 1965, PKI telah dua kali melakukan pemberontakan, yaitu pada tahun 1926 dan tahun 1948 yang semuanya berujung pada kegagalan. Hal yang kemudian membuat bangsa Indonesia mengalami trauma mendalam terhadap PKI ialah peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan tujuh jenderal TNI AD dan beberapa perwira TNI lainnya. Akibat peristiwa tersebut, dalam waktu singkat PKI dibersihkan dari kehidupan politik, dan sosial, serta dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun, melalui MPRS, menetapkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 TAP MPRS tersebut yang berbunyi bahwa:

“Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan fahaman atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparaturnya serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut dilarang.”

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sempat melontarkan ide untuk mencabut TAP MPRS/XXV/Tahun 1966. Pada dasarnya keinginan Gus Dur tersebut untuk menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam pemerintahan Indonesia dari yang sebelumnya cenderung otoriter menjadi demokratis.

Sebagai negara demokrasi, nilai yang mendasari demokrasi menurut Henry B. Mayo dalam Budiardjo (Miriam Budiardjo 1998; 62-64) adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
2. Menjamin adanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan/pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Namun meski Gus Dur telah mengemukakan alasan demokratisasi, sebagian besar masyarakat bereaksi keras menolak pencabutan TAP MPRS tersebut dan menolak paham komunisme diungkit kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat itu, ada beberapa pendapat pro kontra terkait isu PKI dan komunisme ini. Bagi pihak yang pro menilai bahwa iklim demokrasi memungkinkan bangsa Indonesia untuk lebih belajar dari masa lalu agar dapat lebih baik saat melangkah ke depannya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar bahwa usulan pencabutan TAP MPRS tersebut merupakan agenda nasional untuk menjernihkan persoalan bangsa yang pernah ada. Menurutnyanya perlawanan paling ampuh terhadap komunisme atau marxisme harus timbul dari kekuatan masyarakat bukan dari sejumlah regulasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Romo Magnis Suseno, yang menilai bahwa bila komunis tidak pernah disinggung, bangsa Indonesia justru tidak pernah selesai dengan kemelut (A. Muhaimin Iskandar, 2004; 32-35).

Di lain pihak, Akbar Tandjung sebagai pihak yang kontra menilai ide tersebut bertentangan dengan hati nurani masyarakat

Indonesia yang masih trauma atas kekejaman PKI. Kyai Cholil Bisri bahkan berpendapat bahwa untuk mengungkit masalah PKI harus menunggu waktu yang tepat, di saat kehidupan demokrasi bangsa ini sudah dewasa. Pendapat tersebut menegaskan bahwa PKI dan paham komunisme merupakan bahaya laten bagi Indonesia (A. Muhaimin Iskandar, 2004; 32-35).

Kemudian, berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 termasuk dalam kategori yang ditetapkan masih berlaku. Hal ini dilakukan pada saat MPR melakukan peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Bahaya PKI dan Komunisme pada Masa Kini

Bagi negara-negara maju mungkin ideologi politik bukan lagi menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Namun berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, ideologi seringkali masih menjadi persoalan bangsa. Dengan memahami berbagai sepak terjang tingkah laku politik PKI pada masa lalu, dibutuhkan tingkat kepekaan masyarakat terhadap bahaya komunis di Indonesia (Saleh As'ad Djamhari (ed.), 2009; iii-iv).

Sebagaimana di Jerman, memakai simbol Nazi, terutama swastika, termasuk tindakan kriminal. Di Indonesia terkait simbol-simbol PKI memang tetap harus dilarang. Namun untuk masa sekarang ini, Romo Magnis menilai tidak perlu ada tindakan histeria. Beberapa pihak menilai bahwa respons TNI-Polri terhadap PKI saat ini berlebihan. Bahaya komunisme atau paham komunis memang tidak boleh dianggap enteng, namun menurutnya masyarakat tidak perlu terlalu reaktif dalam menanggapi tersebarnya lambang-lambang PKI. Namun di lain pihak, aparat penegak hukum juga harus menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pemuda yang bergaya dengan lambang-lambang PKI, seperti palu-arit, bisa jadi karena mereka tidak tahu jika Indonesia pernah punya sejarah kelam dengan PKI. Sebagaimana yang terjadi pada Susanto yang sempat ditangkap oleh pihak aparat karena mengenakan kaus bergambar palu-arit. Menurut pengakuannya,

ia tidak tahu bahwa kaus bergambar palu-arit tidak boleh digunakan.

Sama halnya dengan masalah lagu genjer-genjer, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, walau secara umum lagu tersebut merupakan lagu daerah biasa, namun menjadi berbeda saat didengar oleh kalangan militer, terutama yang mengalami peristiwa G30S/PKI lagu tersebut sangat menyakitkan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang tidak mengerti tentang sejarah komunisme dan PKI pada masa lampau.

Situasi itu cukup memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, karena kurangnya wawasan kebangsaan dan rasa cinta Tanah Air memudar. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Dengan pesatnya informasi teknologi, arus informasi dari berbagai sumber dengan mudah diterima generasi muda Indonesia. Apabila bekal wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan kurang, maka generasi muda Indonesia akan cenderung menyerap segala informasi yang ada tanpa disaring.

Pemerintah perlu melakukan gerakan peningkatan wawasan kebangsaan dan sosialisasi pemahaman ideologi Pancasila dengan metode pendekatan sosialisasi yang baru dan kontekstual dan perlu terus menerus dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan agar Pancasila dan UUD 1945 dapat terjaga dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu berorientasi kepada kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mencegah kemungkinan terulangnya peristiwa kelam yang pernah terjadi pada bangsa kita.

Pendidikan karakter dan kewaspadaan untuk mencegah bangkitnya komunisme harus diberikan sejak dini dan dilakukan secara konsisten. Hal ini penting karena keberhasilan pendidikan karakter bangsa merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dengan menggelar Sekolah Kebangsaan sebagai salah satu upaya membangkitkan wawasan kebangsaan pada anak-anak muda Surabaya. Sekolah tersebut dilaksanakan di luar sekolah umum biasa dengan mengajak anak-anak ke taman makam pahlawan dan situs-situs bersejarah.

Saat ini Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga telah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Melalui

kebijakan ini diharapkan nilai-nilai Pancasila terus diperjuangkan dan nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam laku seluruh bangsa Indonesia dan menjadi nyata hasilnya untuk masa depan Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila. Melalui prinsip ini, segenap masyarakat menyadari bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Kemudian dengan terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, diharapkan masyarakat akan mampu meredam berbagai bentuk ancaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penutup

Untuk mengatasi permasalahan paham komunisme dan fobia terhadap PKI di Indonesia saat ini dan kemudian hari, hal yang harus senantiasa diingat dan diterapkan ialah kesadaran untuk tidak mengatasnamakan diskriminasi, hak asasi manusia (HAM), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alasan untuk mengembalikan ajaran komunis ke Indonesia, karena Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini pemerintah dituntut konsisten untuk mengawasi dan membatasi munculnya kembali komunisme. Caranya adalah dengan penanaman nilai-nilai Pancasila secara terus menerus kepada masyarakat terutama di lembaga pendidikan dan kepada kaum muda Indonesia. Pemerintah juga harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membina dan memberi pendidikan ahlak yang baik bagi setiap warga negara. Dengan penanaman nilai-nilai ini, maka akan memberi pemahaman yang baik akan pentingnya meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap bahaya komunisme. Walaupun ada opini bahwa bangsa kita tidak lagi perlu mencemaskan bahaya laten komunis, namun sikap waspada tetap perlu dimiliki oleh setiap anggota masyarakat demi terwujudnya ketahanan nasional berdasarkan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara.

Referensi

- A. Muhaemin Iskandar. 2004. *Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah catatan tentang transisi demokrasi kita*, LKiS.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh As'ad Djamhari (ed.). 2009., *Komunisme Di Indonesia Jilid I Perkembangan Gerakan Dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)*, Pusjarah TNI, Jakarta.
- "Arti Palu Arit dalam Simbol PKI, <http://news.merahputih.com/peristiwa/2015/09/30/arti-palu-arit-dalam-simbol-pki/28059/>", diakses 23 Mei 2016.
- "Catatan tentang Usulan Pencabutan TAP MPRS NoXXV/1966, <http://www.oocities.org/injusticedpeople/ROL3105CatatantentangUsulanPencabutanTapMPRSNoXXV1966.htm>", diakses tanggal 23 Mei 2016.
- "Genjer-Genjer tembang terlarang yang bikin Penasaran, <http://regional.liputan6.com/read/2504484/genjer-genjer-tembang-terlarang-yang-bikin-penasaran>", diakses tanggal 23 Mei 2016.
- "Hasil Rapat Bersama Ormas-Ormas Islam dengan Purnawirawan TNI POLRI dan Menhan Untuk Menumpas PKI Komunisme, <https://bhinnekanusantara.org/hasil-rapat-bersama-ormas-ormas-islam-dengan-purn-tnipolri-dan-menhan-untuk-menumpas-pkikomunisme/>", diakses tanggal 31 Mei 2016.
- "Ini Pengalaman Lugu Kuli Bangunan Berkaus Palu Arit, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/28/078774780/ini-pengakuan-lugu-kuli-bangunan-berkaus-palu-arit>", diakses tanggal 31 Mei 2016.
- "Isu Kebangkitan PKI dalam Pandangan Romo Magnis, <http://news.liputan6.com/read/2509680/isu-kebangkitan-pki-dalam-pandangan-romo-magnis>", diakses tanggal 23 Mei 2016.
- "Kata JK Soal Lagu Genjer-Genjer yang Identik dengan PKI, <http://news.liputan6.com/read/2506240/kata-jk-soal-lagu-genjer-genjer-yang-identik-dengan-pki>", diakses tanggal 23 Mei 2016.
- "Ketua MPR Menilai Razia Atribut dan Buku Komunis Berlebihan, <http://news.liputan6.com/read/2507634/ketua-mpr-menilai-razia-atribut-dan-buku-komunis-berlebihan>", diakses tanggal 23 Mei 2016.
- "Ketua MPR: Komunis Sudah Langka, Tapi..., <http://news.liputan6.com/read/2505587/ketua-mpr-komunis-sudah-langka-tapi>", diakses tanggal 23 Mei 2016.
- "Pemerintah Bakal Tetapkan 1 Juni Hari Libur Nasional, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/06274741/pemerintah.bakal.tetapkan.1.juni.hari.libur.nasional>", diakses tanggal 31 Mei 2016.